

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang terus dihadapi Indonesia dari masa ke masa. Meskipun pemerintah telah menjalankan berbagai program penanggulangan kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Indonesia Pintar (PIP), angka kemiskinan nasional masih menunjukkan dinamika yang fluktuatif, terutama saat terjadi krisis seperti pandemi COVID-19. Permasalahan kemiskinan tidak hanya tercermin dari persentase penduduk miskin, tetapi juga dari jumlah penduduk miskin yang menggambarkan besarnya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum. Tingginya jumlah penduduk miskin menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi hasil pembangunan serta keterbatasan akses masyarakat terhadap kesempatan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 sebesar 23,85 juta orang, menurun 0,21 juta orang terhadap September 2024. Lalu persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 8,47 persen, menurun 0,10 persen poin terhadap September 2024. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase penduduk miskin. Penurunan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mengindikasikan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dibandingkan periode sebelumnya, sementara penurunan persentase penduduk miskin mencerminkan peningkatan kesejahteraan secara relatif terhadap total penduduk. Kondisi ini

menunjukkan bahwa berbagai upaya pembangunan dan kebijakan ekonomi yang dijalankan mulai memberikan dampak positif, meskipun penurunan tersebut masih tergolong moderat sehingga diperlukan langkah lanjutan yang lebih terarah dan berkelanjutan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Meskipun angka tersebut perlahan menurun dalam beberapa tahun terakhir, penurunan ini belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah dan kelompok sosial. Hal ini mencerminkan bahwa persoalan kemiskinan di Indonesia bukan hanya soal pendapatan rendah, melainkan juga berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan jaminan sosial.¹

Gambar 1.1 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada gambar 1.1 terlihat adanya perbedaan jumlah penduduk miskin antarprovinsi di Indonesia pada tahun 2024. Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menempati posisi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi. Jawa Barat memasuki tingkat kedua sebesar 3.848,67 ribu jiwa, yang merupakan salah satu provinsi jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi dibandingkan sebagian besar provinsi lainnya, sehingga permasalahan

¹ “Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023,” *Badan Pusat Statistik*, no. 47 (2023): 1–16.

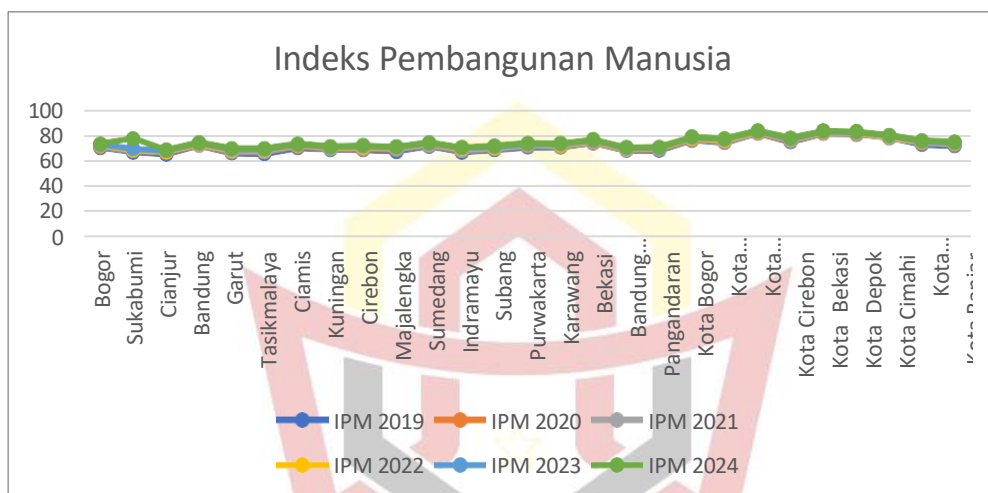
kemiskinan masih menjadi isu penting dalam pembangunan daerah. Tingginya jumlah penduduk miskin di Jawa Barat disebabkan oleh ketimpangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta tingginya biaya hidup di kota besar. Penurunan produktivitas sektor pertanian dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar juga memperparah kondisi ini. Dengan kombinasi faktor ekonomi, sosial, dan struktural tersebut, kemiskinan tetap menjadi isu penting dalam pembangunan daerah.

Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam menganalisis kondisi kesejahteraan ekonomi suatu daerah adalah melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, dan secara teoritis, semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah tersebut dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun dalam praktiknya, pertumbuhan PDRB tidak selalu sejalan dengan penurunan kemiskinan, khususnya jika pertumbuhan ekonomi bersifat eksklusif dan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok. Oleh karena itu, penting untuk melihat lebih jauh bagaimana korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi kesejahteraan di tingkat lokal.

Selain indikator ekonomi, faktor sosial seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga memiliki peran penting dalam memengaruhi tingkat kemiskinan. IPM mengukur tiga dimensi dasar pembangunan manusia: kesehatan (usia harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), dan standar hidup layak (pengeluaran per kapita).

Tingginya IPM menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan tingkat kemiskinan. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan pembangunan manusia antarwilayah yang menyebabkan perbedaan dalam pencapaian kesejahteraan, khususnya di daerah-daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.

Gambar 1.2 Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat 2019-2024



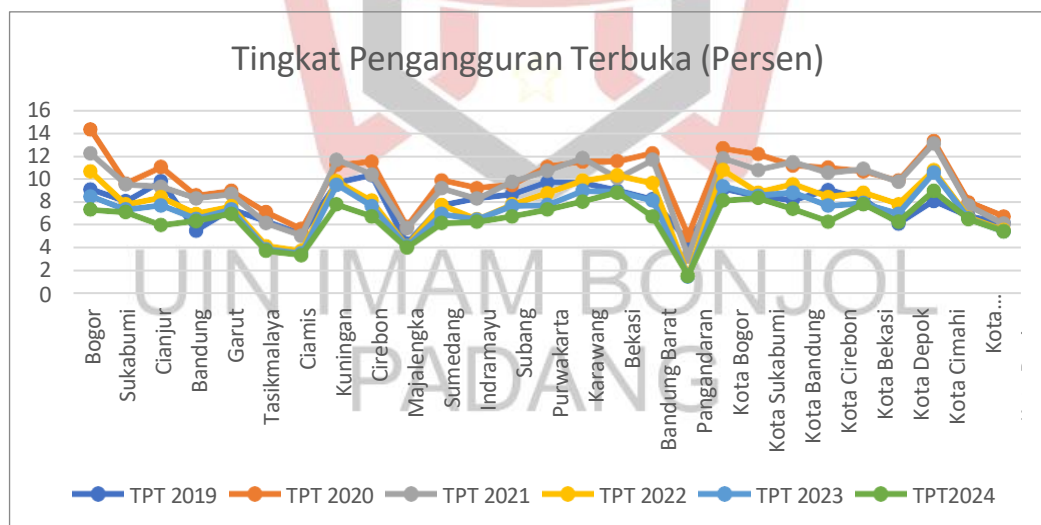
Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada Gambar 1.1 grafik Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Jawa barat 2019-2024 terlihat adanya peningkatan IPM di seluruh wilayah setiap tahunnya. Wilayah dengan nilai IPM tertinggi terletak pada Kota Bandung dan wilayah dengan nilai IPM terendah terletak pada Kabupaten Cianjur. Perbedaan ini mencerminkan kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan karena berkurangnya kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendapatan tetap. Ketika jumlah tenaga kerja yang tidak terserap meningkat,

maka risiko rumah tangga jatuh ke dalam jurang kemiskinan juga meningkat. Terlebih lagi, dalam konteks ekonomi yang dinamis, tantangan dalam dunia kerja seperti ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri (mismatch) turut memperburuk situasi pengangguran. Selain itu, tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka juga mencerminkan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja oleh sektor-sektor produktif dalam perekonomian. Kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia guna menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, permasalahan pengangguran tidak hanya dilihat dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas tenaga kerja.²

Gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Barat 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik

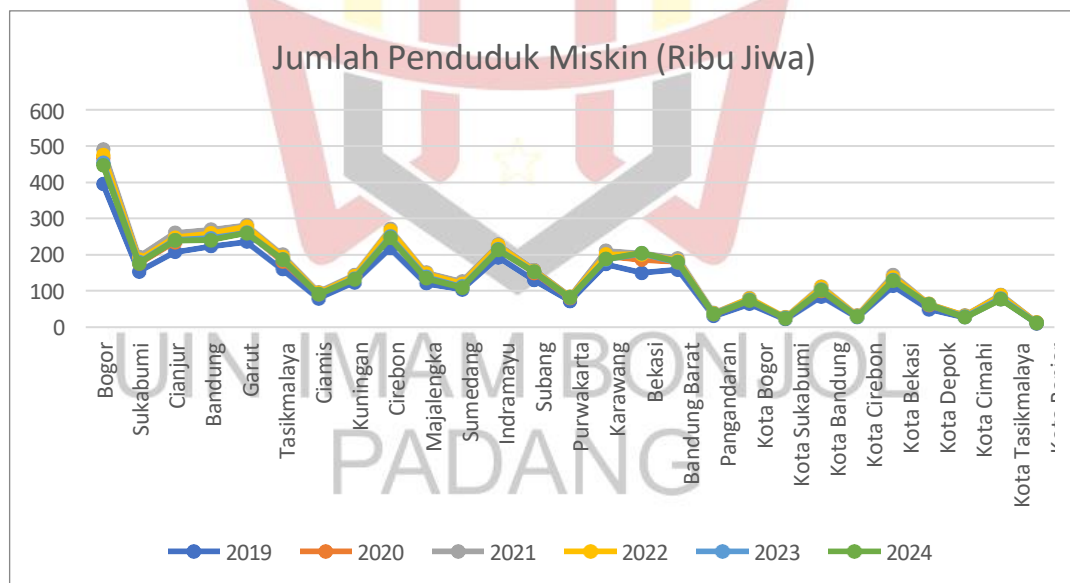
Gambar 1.2 grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Barat 2019-2024 terdapat wilayah yang menduduki Tingkat Pengangguran Terbuka Tertinggi pada wilayah Kabupaten Bogor sebesar 14,29% pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena efek pandemi Covid-19 terhadap berkurangnya lapangan kerja. Namun yang menduduki wilayah terendah terdapat pada

² Nurul Arifin and Yeni Hendriyani, "Pdrb, Ipm, Dan Kemiskinan Di Indonesia," *Finansha: Journal of Sharia Financial Management* 3, no. 2 (2022): 87–103, <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v3i2.20947>.

Kabupaten Pangandaran sebesar 1,52% pada tahun 2023. Hal ini terjadi karena struktur ekonominya didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang menyerap tenaga kerja local secara luas.

Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam mengatasi kemiskinan. Setiap kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda-beda, baik dari segi kapasitas ekonomi, kualitas sumber daya manusia, hingga tingkat pengangguran. Ketimpangan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan tingkat kemiskinan antarwilayah.

Gambar 1.4 Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.3 menunjukkan perbandingan jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam kurun waktu 2019-2024. Jumlah penduduk miskin tertinggi terletak di Kota Bogor sepanjang tahun 2019-2024. Nilainya berkisar 450-500 ribu jiwa, jauh dari daerah lain. Namun

jumlah penduduk miskin terendah terletak pada Kota Banjar dengan jumlah penduduk miskin hanya sekitar 20-40 ribu jiwa.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menganalisis bagaimana pengaruh PDRB, IPM, dan TPT terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor dominan yang memengaruhi kemiskinan di daerah, sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan berkeadilan.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat 2019-2024?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat 2019-2024?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat 2019-2024?
4. Bagaimana pengaruh PDRB, IPM, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019–2024?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat 2019-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat 2019-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap

³ “Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat,” n.d.

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat 2019-2024

4. Untuk mengetahui pengaruh PDRB, IPM, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019–2024.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari proposal ini yaitu berupa teoritis dan praktis di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan baru mengenai analisis pengaruh PDRB, IPM dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat 2019-2024.
 - b. Dapat berkontribusi dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan
 - c. Sebagai acuan, referensi, atau pertimbangan dalam melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah
Bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengarahkan pembangunan daerah dan sebagai dasar pengambilan keputusan.
 - b. Bagi Peneliti

Sebagai tempat latihan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dan penelitian ini diharapkan agar dapat ekonomi yang ada di lingkungan sekitar.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pembahasan proposal ini, maka peneliti membagi kepada lima bab yang masing-masing bab terdiri sub bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Berisikan tentang pendahuluan, latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Berisikan tentang landasan teoritis yang membahas tentang analisis pengaruh PDRB, IPM, dan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan. Serta Kajian Terdahulu, kerangka Berpikir, dan Hipotesis.

BAB III: Berisikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Berisikan tentang hasil penelitian yang membahas tentang analisis pengaruh PDRB, IPM, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Jawa Barat 2019-2024.

BAB V: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran